

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sebagai salah satu penggerak roda perekonomian Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan suatu usaha korporasi atau perusahaan yang didirikan oleh pemerintah Republik Indonesia yang seluruh atau sebagian modal diberikan oleh negara melalui Penyertaan Modal Negara (PMN). Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada tahun 2019 tercatat sebanyak 115 perusahaan yang langsung dibawah kementerian BUMN (www.bumn.co.id, 2019). Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada tahun 2019 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) terdapat 20 emiten atau perusahaan yang bergerak di berbagai industri (www.idx.co.id, 2019).

Perusahaan BUMN mendapatkan modal salah satunya dengan penyertaan modal negara diatur pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016, komposisi dari kepemilikan negara terhadap BUMN paling sedikit adalah 51%. Menurut Eforis (2017), Perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan melepas sebagian kepemilikan saham BUMN ke publik yang dapat membantu pemerintah dalam pengawasan kinerja keuangan BUMN. Laporan keuangan BUMN menjadi lebih transparan hal ini juga dapat membuat manajemen yang mengelola BUMN bertindak untuk memberikan kesejahteraan bagi para pemegang saham yang akhirnya berdampak kepada kenaikan kinerja keuangan.

Menurut Sipayung, Nasution dan Siregar (2013), Badan Usaha Milik Negara (BUMN) didirikan bertujuan diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 yaitu sebagai sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional dan penerimaan negara pada khususnya. Kemudian menyelenggarakan pelayanan dan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa untuk pemenuhan hajat hidup orang banyak dengan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan sehat. Serta menjadi pembimbing atau bantuan kepada golongan ekonomi lemah dan perintis kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta, koperasi dan masyarakat.

Pada tahun 2019 sebagian penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar 17,8 T untuk menyelesaikan beberapa proyek prioritas pemerintah yang masih berjalan (APBN, 2019). BUMN diharapkan meningkatkan kinerja keuangan dari masa ke masa guna mendukung pendapatan negara dari BUMN turut berkontribusi dalam penerimaan negara untuk mensejahterakan masyarakat. Tata cara penyertaan modal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2005 tentang penyertaan modal pada BUMN.

Pernyataan-pernyataan diatas juga sesuai dengan Q.S. Al-Ahqaaf ayat 19 yang berbunyi:

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا ۖ وَيُؤْتِيهِمْ أَعْمَالَهُمْ ۖ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: “Dan bagi masing-masing” mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan” berdasarkan dari uraian ayat diatas Allah pasti akan membalas apa yang telah mereka kerjakan. Jika seorang melaksanakan pekerjaan dengan baik dan menunjukkan kinerja yang baik pula bagi organisasi dan institusinya akan mendapatkan hasil yang baik juga dari kerjaannya dan memeberikan keuntungan. Berkaitan dengan hadist *Rasululloh shallaou ‘alayhi wa salalm* diriwayatkan oleh Imam Thabrani:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ الْعَمَلَ أَنْ يُتَّقِنَهُ

Artinya “Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan suatu pekerjaan, dilakukan secara *Itqan* (tepat, terarah, jelas dan tuntas)” (HR. Thabrani). Dari hadist diatas tersebut menjelaskan bahwa setiap pekerjaan yang kita lakukan dilaksanakan semata-mata untuk mencapai ridha Allah dengan itu kita akan berkerja dengan jelas, tepat, terarah dan tuntas dalam menyelesaikan pekerjaan. Dengan itu maka kita mendapat hasil kinerja yang optimal.

Kebijakan pemerintah untuk modal yang disetorkan oleh negara kepada BUMN tidak semuanya mendapatkan keuntungan dalam menegelola BUMN. BUMN yang memperoleh Penyertaan Modal Negara (PMN) atau *Public Service Obligation* (PSO) dari negara akan tetapi beberapa BUMN malah merugi dan pailit dalam mengelola keuangan. Tantangan persaingan bisnis yang semakin mengglobal menuntut perusahaan untuk selalu berkembang dan peningkatan

dalam produktivitas untuk membangun kinerja keuangan BUMN supaya tidak merugi. Belakangan ini beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) penyertaan modal yang diberikan oleh negara justru merugi seperti Krakatau Steel dan Garuda Indonesia yang bermasalah pada laporan keuangan sehingga ditinjau oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (www.cnbcindonesia.com, 2019).

Dalam tujuh tahun terakhir Krakatau Steel tidak pernah mencatatkan laba terhadap laporan keuangannya. Kerugian yang paling besar pada tahun 2015 Karkatau Steel memncatatkan kerugian senilai Rp. 4,160 Triliun dan di 2018 mengalami kerugian Rp. 1,074 Triliun dan utang tercatat sebesar Rp. 36,105 Triliun. Kemudian Garuda Indonesia di tahun 2018 mencatatkan laba bersih senilai Rp. 11,6 Miliar akan tetapi penyajian laporan keuangan yang terbukti tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK menjatuhkan sanksi administratif kepada direksi dan komisaris perusahaan untuk memperbaiki dan menyajikan kembali laporan keuangan tahunan di tahun 2018 serta melakukan *public expose*. Sesuai dengan pelanggaran tersebut pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU PM) *public expose* paling lambat dilaksanakan 14 hari setelah ditetapkan surat sanksi. Setelah melakukan perbaikan laporan keuangan ternyata Garuda Indonesia mengalami kerugian senilai Rp. 2,5 Triliun (OJK, 2019).

Tentu fakta ini sangat memprihatinkan karena salah satu manfaat BUMN didirikan adalah untuk menghimpun dana dan mengisi kas negara. Dipergunakan

untuk memajukan dan mengembangkan perekonomian negara serta mensejahterakan hajat hidup orang banyak. Menurut Wardani dan Nurjanah (2018), BUMN turut berkontribusi terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang melalui deviden dan setoran pajak. Sebab jika semakin tinggi laba perusahaan BUMN maka semakin tinggi pajak yang harus disetorkan untuk berkontribusi terhadap APBN.

Menurut Yu (2013), seharusnya perusahaan dengan tingkat kepemilikan negara yang besar memiliki keuntungan karena negara menyediakan sumber daya dan otoritas yang lebih besar. Otoritas inilah yang akan membantu BUMN untuk meningkatkan pendapatan perusahaan yang berdampak pada kinerja keuangan. Maka dari itu kinerja keuangan harus dijalankan dengan baik dari sisi penyertaan modal, pertumbuhan aset, persentase rasio keuangan likuiditas serta kepemilikan negara yang dapat melihat bagaimana kinerja perusahaan dalam mengelola keuntungan dan utang untuk setiap operasional perusahaan BUMN yang dijalankan secara periodik.

Menurut Wardani dan Nurjanah (2018), kinerja Keuangan perusahaan dapat dilihat dengan cara menganalisis laporan keuangan. Setiap BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (*go public*) wajib menerbitkan laporan keuangan secara periodik. Laporan ini yang dapat digunakan masyarakat untuk mengetahui dan menilai kinerja keuangan BUMN yang sebagian besar penyertaan modalnya dari negara yang bersumber dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat. Sehingga masyarakat dapat mengetahui secara langsung dan mengamati bagaimana kinerja keuangan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia. Penilaian Kinerja pada BUMN berdasarkan Keputusan Menteri BUMN KEP-100/MBU/2002 dapat dilihat dari beberapa aspek indikator rasio keuangan.

Penyertaan modal dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan BUMN. Menurut Wardani dan Nurjanah (2018), penyertaan modal dapat digunakan untuk investasi atau penambahan seperti aset tetap untuk meningkatkan kinerja keuangan BUMN. Semakin banyak penyertaan modal yang diberikan kepada perusahaan BUMN untuk digunakan berinvestasi dan operasional perusahaan maka diharapkan akan meningkatkan kegiatan operasional perusahaan BUMN yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja keuangan. Hasil Penelitian milik Sudaryo dan Pratiwi (2016), Wardani dan Nurjanah (2018) dan Destari dan Hendratno (2019) menunjukkan bahwa penyertaan modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Berbeda dengan hasil Sudarno, Idrus, Salim dan Djumahir (2011) dan Hendawati (2017) bahwa penyertaan modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.

Menurut Sudarno, Idrus, Salim dan Djumahir (2011), semakin besar pertumbuhan aset yang dimiliki perusahaan BUMN aset tetap maupun aset lancar dapat digunakan operasional perusahaan BUMN untuk menaikkan laba perusahaan. Sehingga semakin besar pertumbuhan aset pada perusahaan BUMN diharapkan dapat meningkatkan laba perusahaan BUMN. Ketika pertumbuhan aset mengalami penurunan maka penyertaan modal digunakan untuk membiayai beban perusahaan sehingga dapat menurunkan laba perusahaan BUMN. Hasil

Penelitian milik Sudarno, Idrus, Salim dan Djumahir (2011), mengatakan bahwa pertumbuhan aset berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Berbeda dengan penelitian milik Wardani dan Nurjanah (2018), mengatakan bahwa pertumbuhan aset berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Penambahan penyertaan modal hanya digunakan untuk pengeluaran biaya-biaya operasional sehingga biaya menjadi besar dan kinerja keuangan menjadi rendah

Sehubungan dengan likuiditas, menurut Yosra dan Sioud (2011), rasio likuiditas yang dapat mengukur kemampuan perusahaan BUMN dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan kewajiban yang harus segera terpenuhi terhitung dalam satu tahun sejak tanggal termin. Semakin tinggi nilai rasio likuiditas maka semakin baik perusahaan BUMN dalam mengelola utang jangka pendeknya dan menilai kinerja keuangan perusahaan BUMN. Sehingga dapat menilai perusahaan BUMN yang mengalami kerugian tersebut berasal dari hutang atau operasional perusahaan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Waleed, Pasha dan Akhtar (2016) dan Destari dan Hendratno (2019) menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan BUMN. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sudaryo dan Pratiwi (2016) dan Hendawati (2017) hasil penelitiannya tidak berpengaruh signifikan.

Kaitannya dengan kepemilikan negara, kepemilikan negara yang tinggi menunjukkan pemerintah memiliki persentase saham yang besar atas modal perusahaan. Tingginya kepemilikan saham yang dimiliki pemerintah maka semakin besar penengendalian pemerintah atas perusahaan. Menurut Yu (2013), perusahaan dengan tingkat kepemilikan negara yang besar memiliki keuntungan

karena negara menyediakan sumber daya dan otoritas yang lebih besar. Otoritas inilah yang akan membantu BUMN untuk meningkatkan pendapatan perusahaan yang berdampak pada kinerja keuangan. Tetapi banyak perusahaan BUMN yang malah merugi dengan melihat laporan keuangannya. Hasil penelitian oleh Sabrina dan Muharam (2015) dan Eforis (2017) menunjukkan bahwa kepemilikan negara berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan BUMN. Berbeda dengan penelitian pada Yu (2013) bahwa kepemilikan negara berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

Fenomena-fenomena diatas mendorong penulis untuk meneliti dan mengkaji penyertaan modal, pertumbuhan aset, likuiditas dan kepemilikan negara terhadap kinerja keuangan Badan Usaha Milik Negara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan supaya publik dapat mengetahui dan menilai kinerja keuangan Badan Usaha Milik Negara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kemudian ketidakkonsistenan hasil dari penelitian-penelitian terdahulu memotivasi peneliti untuk melakukan pengujian kembali pada penyertaan modal, likuiditas dan kepemilikan negara. Variabel independen pada penelitian ini adalah penyertaan modal, pertumbuhan aset, likuiditas, dan kepemilikan negara. Variabel dependen yaitu kinerja keuangan BUMN yang terdaftar di BEI.

Pada penelitian ini penulis melakukan replikasi dari penelitian sebelumnya yaitu Wardani dan Nurjanah (2018). Perbedaan dengan peneliti terdahulu yaitu populasi yang digunakan ialah menggunakan populasi pada seluruh BUMN. Penelitian ini dilakukan pada Badan Usaha Milik Negara yang terdaftar di Bursa

Efek Indonesia. Waktu dalam penelitian ini menggunakan periode 2015-2018. Alasan menggunakan sampel BUMN yang terdaftar di BEI adalah perusahaan yang dikelola oleh negara yang mendapatkan penyertaan modal negara, namun kinerja keuangan perusahaan beberapa tahun terakhir malah merugi. Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat BUMN dapat melihat pengelolaan penyertaan modal, pertumbuhan aset, likuiditas, dan kepemilikan negara atas kebijakan yang dikeluarkan terhadap perusahaan yang dimiliki oleh 270 juta jiwa masyarakat Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini berjudul **“PENGARUH PENYERTAAN MODAL, PERTUMBUHAN ASET, LIKUIDITAS, DAN KEPEMILIKAN NEGARA TERHADAP KINERJA KEUANGAN BADAN USAHA MILIK NEGARA”**

B. Batasan Penelitian

Batasan pada penelitian ini adalah penelitian ini menggunakan empat variabel independen yaitu penyertaan modal, pertumbuhan aset, likuiditas dan kepemilikan negara. Penelitian ini juga mengambil populasi Badan Usaha Milik Negara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam empat periode yaitu 2015-2018.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang sudah dijelaskan diatas, maka dalam penelitian ini terdapat beberapa rumusan masalah dari hasil

penjabaran masalah diatas. Adapun rumusan masalah yang diteliti sebagai berikut:

1. Apakah kinerja keuangan dapat dipengaruhi oleh penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
2. Apakah kinerja keuangan dapat dipengaruhi oleh pertumbuhan aset pada Badan Usaha Milik Negara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
3. Apakah kinerja keuangan dapat dipengaruhi oleh likuiditas pada Badan Usaha Milik Negara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
4. Apakah kinerja keuangan dapat dipengaruhi oleh kepemilikan negara pada Badan Usaha Milik Negara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh variabel penyertaan modal terhadap kinerja keuangan Badan Usaha Milik Negara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh variabel pertumbuhan aset terhadap kinerja keuangan Badan Usaha Milik Negara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh variabel likuiditas terhadap kinerja keuangan Badan Usaha Milik Negara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh variabel kepemilikan negara terhadap kinerja keuangan Badan Usaha Milik Negara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoristis bagi akademisi, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi penelitian lainnya atau mungkin penelitian ini dapat dikembangkan dengan penelitian yang sesuai dengan penerapan kinerja keuangan Badan Usaha Milik Negara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Manfaat bagi Pemerintah, penelitian ini dapat dijadikan oleh pemerintah sebagai bahan referensi evaluasi untuk beberapa kinerja keuangan Badan Usaha Milik Negara yang semakin merugi.
3. Manfaat bagi masyarakat, penelitian ini untuk menambah wawasan serata peran masyarakat dalam mengawasi kinerja keuangan Badan Usaha Milik Negara yang informasinya semakin terbuka dan mudah didapat.
4. Manfaat bagi peneliti, diharapkan penelitian ini bisa membuat peneliti lebih paham dan pengetahuannya lebih meningkat tentang penerapan kinerja keuangan Badan Usaha Milik Negara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.